



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

23 September 2026

Nomor : 100.2.7/3332/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Reboan

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan REBOAN: **REmbuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri**, dengan ini diohon kehadiran Bupati/Walikota untuk hadir secara daring pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai (Untuk Kepala Daerah diharapkan hadir pada pukul 08.30 untuk absensi dan cek suara sebelum acara dimulai)
Agenda : Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri
Tautan Zoom : *Meeting ID* : 949 1011 6939 *Passcode* : REBOANOTDA
Pimpinan : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peserta : 1. Bupati/Wali Kota (tidak diwakilkan), menggunakan format nama (Nama_Jabatan_Daerah)
2. Kementerian/Lembaga, menggunakan format nama (Nama_Jabatan/asal instansi)

Adapun substansi yang akan menjadi topik pembahasan antara lain:

1. Evaluasi serta upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah kepada Pemerintah Daerah;
2. Invenstasi dukungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah
3. Isu dan permasalahan lainnya terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
4. Berkenaan dengan substansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 .s.d 3, dimohon Bupati/Walikota menyampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui Sdr. Aqsa Kodri HP081294428789 atau Sdri. Aster Manao HP 081380666701.

Demikian untuk maklum dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Indra Gunawan, SE., MPA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197007151996031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Undangan

A. Bupati/Walikota

1. Bupati Aceh Selatan;
2. Bupati Tebo;
3. Bupati Bangka Tengah;
4. Bupati Flores Timur
5. Bupati Sanggau;
6. Bupati Sambas;
7. Bupati Pematang;
8. Bupati Bandung Barat;
9. Bupati Mukomuko; dan
10. Bupati Lebong.

B. Kementerian/Lembaga

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
7. Sekretaris Jenderal kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Ekonomi Kreatif;
9. Sekretaris Jenderal Utama Badan Gizi Nasional;
10. Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
11. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik, Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
13. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan; dan
14. Kepala Biro Umum Kementerian Ekonomi Kreatif.

C. Biro Pemerintahan Provinsi

1. Biro Pemerintahan Provinsi. Aceh Selatan;
2. Biro Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Biro Pemerintahan Provinsi Kep Bangka Belitung;
4. Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;
5. Biro Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara imur;
6. Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
7. Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Barat; dan
8. Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

D. Asisten Pemerintahan Kabupaten/Kota

1. Asisten Pemerintahan Kabupaten Barito Timur;
2. Asisten Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
3. Asisten Pemerintahan Kabupaten Lanny Jaya; dan
4. Asisten Pemerintahan kabupaten Tojo Una-Una.

E. Lingkup Kementerian Dalam Negeri

- ;
1. Sekretaris Ditjen. Bina Administrasi Kewilayahan
 2. Sekretaris Ditjen. Bina Keuangan Daerah;
 3. Sekretaris Ditjen. Bina Pembangunan Daerah;
 4. Sekretaris Ditjen. Bina Pemerintahan Desa;
 5. Sekretaris Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 6. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
 7. Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah;
 9. Direktur Produk Hukum Daerah; dan
 10. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.